



# RENJA 2024

## **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2023**

JL. Kusuma Bangsa Komplek Perkantoran KM. 5 Gd. D Lt. I Kav. II Tana Paser

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk menetapkan arah kebijakan pembangunan yang dapat merespon kebutuhan masyarakat. Arah kebijakan daerah tersebut diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan dengan mencermati dinamika pertumbuhan ekonomi daerah.

Salah satu dokumen perencanaan yang memiliki urgensi dalam pembangunan daerah antara lain Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diserahi tanggung jawab untuk menyusun rencana kerja spesifik dalam satu tahun anggaran sekaligus mampu menjawab dan menterjemahkan tujuan, sasaran, target capaian kinerja, serta bagaimana mengintegrasikan program dan kegiatan pelayanan OPD sesuai tupoksinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang wajib memadukan seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggung jawaban serta pelaporan kinerja dan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan dokumen perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.

Sesuai dengan amanat peraturan perundang – undangan tersebut, maka Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoptimalkan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang telah dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **B. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
6. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025.
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua aLas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indcnesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
18. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
21. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJP dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  
26. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Paser sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2015 .
27. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
28. Peraturan Bupati Kabupaten Paser Nomor 67 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser.

### **C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )**

#### 1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai dokumen Perencanaan OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun pada tahun 2023

#### 2. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah : Untuk menjabarkan Tujuan, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Disdukcapil Tahun 2021-2026, dilengkapi dengan sasaran kinerja dengan menggunakan pagu indikatif untuk anggaran yang sedang disusun dan prakiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya.

## **D. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja).**

### **BAB I       PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan tujuan
- D. Sistematika Penyusunan Renja

### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU (TAHUN 2022)**

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra  
Perangkat daerah
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- C. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- D. Review Terhadap Rancangan Awal Renja
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- B. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- C. Program dan Kegiatan

**BAB II**  
**Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022**

**A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra**

Akuntabilitas kinerja merupakan uraian pertanggungjawaban kinerja yang terdiri dari hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk uraian keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil sebagai implementasi pelaksanaan kebijakan dan program sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser. Selain itu dikemukakan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Disdukcapil Tahun 2023**

Kode	Urusan/bid Urusan Pemda dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ kegiatan	Target Kinerja Capaian Program	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Program Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program dan Kegiatan Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra S/d Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Prosen tase		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan S/d Tahun 2023	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.12	Urusan Pemerintahan wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
2.12.01	Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Administrai Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		100	10		98,19	10		
2.12.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		99,99	-	-	-	10		
2.12.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-	-	-	2		
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		-	-	-	-	10		
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		-	-	-	-	2		
2.12.01.2.01.06	<u>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</u>	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		99,56	-	-	-	2		

2.12.01.2.01.0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja		97,78	5		99,87	5		
<b>2.12.01.2.06</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>									
2.12.01.2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin		98,44	10		100	15		
2.12.01.2.06.0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Perlengkapan Kebersihan		95,16	10		99,82	100		
2.12.01.2.06.0 5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak		100	25		99,82	25		
2.12.01.2.06.0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi		96,6	60		66,25	60		
	Penyediaan peralatan Rumah Tangga			-	-		-			
<b>2.12.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
2.12.01.2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN		71,36	1		76,10	55		
2.12.01.2.02.0 4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan		90,90	1		91,28			
2.12.01.2.09.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		-	-	-	-	20		
<b>2.12.01.2.09</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>									
2.12.01.2.09.0 2	Penyediaan jasa Pemeliharaan ,biaya pemeliharaan ,pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara		89,57	4		88,24	4		
2.12.01.2.09.0 6	Penyediaan jasa pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara		9,17			99,98			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	-	-	-	100		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10 = (5+7+9)</b>	<b>11 = (10/4)</b>
<b>2.12.02</b>	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>									
<b>2.12.02.2.01</b>	<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>									
2.12.02.2.01.0 1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi		90,76	100		98,62	100		

<a href="#">2.12.02.2.01.04</a>	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk		93,39	8.000		96,76	8.000		
<a href="#">2.12.02.2.01.07</a>	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan		99,43	8.000		81,58	300		
	<b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	Penataan Pendaftaran Penduduk		-						
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan		-			-	10.000		
	<b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>									
	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk		-			-	2		
	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk		-			-	1		
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.</b>									
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk		-			-	1		
<b>2.12.03</b>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>									
<a href="#">2.12.03.2.01</a>	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>									
<a href="#">2.12.03.2.01.01</a>	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting		93,39	6.000		88,33	6.000		
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>									
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang		-	-	-	-	50		

		Beragama								
	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil		-	-	-	-	5		
<b>2.06.01.15</b>	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil		-	-	-	-	5		
2.06.01.15.16	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>			-	-	-	-			
	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait		-	-	-	-	40		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10 = (5+7+9)</b>	<b>11 = (10/4)</b>
<b>2.12.04</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>									
<b>2.12.04.2.01</b>	<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan								
<u>2.12.04.2.01.0</u> <u>1</u>	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan			99,20	12		90,37	12		
<u>2.12.04.2.01.0</u> <u>2</u>	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan			86,14	-	-	-			
<b>2.12.04.2.03</b>	<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		-				2		
<u>2.12.04.2.03.0</u> <u>4</u>	<b>Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</b>			87,49	-	-	-			
<u>2.12.04.2.03.0</u> <u>5</u>	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi		89,83	-	-	-			
	Kerja sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi			-	-	-	-			
	<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data		-	-	-	-	4		

	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan		-	-	-	-			
<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Terlaksananya Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah</b>	<b>100%</b>	<b>80%</b>						
<b>2.12.05.2.01</b>	<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>									
<u>2.12.05.2.01.02</u>	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain		84,32	4		97,83			
<b>RATA RATA (DARI 5 PROGRAM)</b>										

**Tabel 2.14 (T-C.30)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2022-2026**

No	Indikator Kinerja	Target					Realisasi					Prosentase %				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	80	81	82	83	84	80	81	-	-	-	80	81	-	-	-
2.	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	100	100	-	-	-
3.	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	100	100	-	-	-

4.	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	10	15	20	25	30	10	15	-	-	-	10	15	-	-	-
5.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	65	72	74	76	80	65	72	-	-	-	65	72	-	-	-
6.	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-
7.	Penilaian SAKIP	61 (BB)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	81 (A)	B	BB	-	-	-	61	65	-	-	-

**Tabel 2.1**  
**REALISASI KEUANGAN BELANJA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2022**

Dalam Rupiah

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	JUMLAH DANA	REALISASI	SISA DANA	(%)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.074.722.050	4,623,089,698	1.252.225.624	79,39%
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	257.127.584	234,715,015	1.169.800	99,55%
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>				
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.649.630	8,649,630	0	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	79.998.440	79,857,160	141.280	99,82%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.000.000	24,956,000	44.000	99,82%
	Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD	284.425.000	190,149,850	10.835.150	96,19%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	64.681.690	55,784,390	7.600.300	88,25%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.280.000	42,270,000	10.000	99,98%
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26.541.900	26,060,272	11.078	99,96%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000	14,980,940	19.060	99,87%
<b>II</b>	<b>Program Pencatatan Sipil</b>				
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	363.984.220	321,503,020	9.696.200	97,34%
<b>III</b>	<b>Program Pendaftaran Penduduk</b>				
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	11.220.000	11,065,000	155.000	98,62%
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	884.233.480	855,551,180	24.862.300	97,19%
	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.100.000	10,687,000	2.413.000	81,58%
<b>V</b>	<b>Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>				
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2.530.089.460	2,286,379,987	114.979.475	95,46%

<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>				
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	7.899.700	7,728,100	171.600	97,83%
<b>JUMLAH</b>		<b>10.688.953.154</b>	<b>8.793.427.242</b>	<b>1.424.333.867</b>	<b>86,67%</b>

### **B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dilakukan terhadap tiap indikator sasaran dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan anggaran atas setiap kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dihitung terlebih dahulu dengan rasio ekonomi dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rasio Ekonomi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100 \%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Rasio ekonomi}}$$

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2022-2026**

No	Indikator Kinerja	Angka/Nilai Target/Standar IKU	Target					Realisasi					Proyeksi		Catatan Penting
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2023	2024	
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	Persen	80	81	82	83	84	80	81	-	-	-	81	82	
2.	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	Persen	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	2	2	
3.	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	Persen	1	1	1	1	1	2	2	-	-	-	1	1	
4.	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	Persen	10	15	20	25	30	10	15	-	-	-	15	20	
5.	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persen	65	72	74	76	80	65	72	-	-	-	72	74	
6.	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	Persen	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	
7.	Penilaian SAKIP	Nilai	61 (BB)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	81 (A)	B	BB	-	-	-	65 (B)	70 (BB)	

Dari tabel di atas diperoleh hasil bahwa nilai rata rata pencapaian pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser sampai dengan tahun 2019 terhadap perkiraan realisasi pencapaian target Rencana Strategis sampai dengan tahun 2020 adalah 80,132%. Dikarenakan terjadinya perubahan nomenklatur Program, Kegiatan dan ditambah dengan adanya sub kegiatan maka untuk capaian target Tahun Anggaran 2021 dibuat terpisah dan tidak bisa digabung dengan hasil capaian Tahun Anggaran sebelumnya.

### **C. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 26 November 2013 merupakan perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan. Tujuan utama dari perubahan Undang-Undang dimaksud adalah untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan. Perubahan Undang- Undang ini, sekaligus berdampak langsung dalam pengembangan pelayanan dan penyusunan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Perubahan Undang-Undang Kependudukan ditambah dengan dinamika perkembangan dalam segala aspek kehidupan masyarakat yang terjadi sekarang menimbulkan tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan administrasi kependudukan.

---

Tantangan yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser antara lain :  
***Ranhir Renja Disdukcapil Kab. Paser Tahun 2024***

1. Kondisi Geografis yang menghambat masyarakat dalam mengurus administrasi administrasi kependudukan;
2. Belum optimalnya koordinasi antar instansi/unit kerja terkait;
3. Belum optimalnya penerapan sanksi terhadap para pelanggar ketentuan perundangan yang berlaku di bidang kependudukan;
4. Belum maksimalnya jaringan komunikasi data dari Kecamatan ke Dinas secara online dalam menunjang keakurasian data base penduduk;
5. Mobilitas penduduk cukup tinggi dari luar daerah, Peluang yang ada dalam pengembangan pelayanan antara lain :
6. Partisipasi Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat semakin besar;
7. Adanya peraturan perundangan yang dapat memperkuat operasionalisasi pelaksanaan tugas;
8. Dokumen kependudukan yang diterbitkan menjadi satu-satunya bukti diri yang sah dari Pemerintah dan dipergunakan untuk proses di Instansi/Lembaga/ unit kerja lainnya;
9. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan golbalisasi yang tidak mengenal batas wilayah dan budaya;
10. Perkembangan Kabupaten yang semakin pesat seiring perkembangan masyarakat;

Dan berikut formulasi dan yang berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti:

1. Pemenuhan akan kebutuhan layanan dokumen administrasi kependudukan bagi warga masyarakat di Kabupaten Paser.
2. Pemenuhan akan kebutuhan layanan dokumen pencatatan sipil bagi setiap warga Kabupaten Paser.
3. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan serta meningkatkan skill dan kemampuan dari SDM.

Kondisi yang harus menjadi perhatian karena dampaknya yang sangat signifikan

bagi perangkat daerah di masa yang akan datang merupakan definisi isu- isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

#### **D. Review Terhadap Rancangan Awal Renja**

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Paser Tahun 2024, adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3**  
**Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2024**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser**

Rancangan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 % 85 %	6.957.047.615, 00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Paser	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	74 % 85 %	8.348.457.138	
A.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100	125.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	100	150.000.000	
A1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	35.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	42.000.000	
A1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	1	30.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Paser	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	1	36.000.000	
A1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1	60.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil	1	72.000.000	

Rancangan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
			Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			
A2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase temuan ditidaklanjuti	100	6.577.970.754	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase temuan ditidaklanjuti	100	7.893.564.904	
A2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	33	6.340.222.050	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	33	7.608.266.460	
A2.2	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan	10	237.748.704	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Paser	Jumlah Laporan Keuangan	10	285.298.444	
A3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	214.076.861	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Paser	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100	256.894.633	
A3.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan mesin	15	20.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Paser	Jumlah Peralatan dan mesin	15	24.000.000	
A3.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	5.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Paser	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	6.000.000	

Rancangan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
A3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah ATK dan PerlengkapanKebersihan	50	24.576.861	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Paser	Jumlah ATK dan Perlengkapan Kebersihan	50	29.492.233	
A3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Barang Cetak	25	7.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Paser	Jumlah Barang Cetak	25	8.400.000	
A3.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumla Perjalanan Dinas dan RapatKordinasi	20	157.500.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasidan Konsultasi SKPD	Kab. Paser	Jumla Perjalanan Dinas dan Rapat Kordinasi	20	189.000.000	
A4	<b>Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Paser</b>	<b>Persentase barang inventaris dalam kondisi baik</b>	<b>47</b>	<b>40.000.000</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Paser</b>	<b>Persentase barang inventaris dalam kondisi baik</b>	<b>47</b>	<b>48.000.000</b>	
A4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Mobil Operasional YangDipelihara	4	25,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Paser	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	4	30.000.000	
A4.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah peralatan Komputer YangDipelihara	100	15.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Paser	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	100	18.000.000	

Rancangan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Paser	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	97	245.000.000,00	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Kab. Paser	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)	97	294.000.000	
B.1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	<i>Persentase data kependudukan yang terpenuhi</i>	97	80.000.000	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	<i>Persentase data kependudukan yang terpenuhi</i>	97	96.000.000	
B1.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	100	15.000,000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	100	18.000.000	
B1.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8000	50.000,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	8000	60.000.000	
B1.3	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2	15.000,000	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2	18.000.000	
B.2	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	<i>Persentase dokumen kependudukan yang terpenuhi</i>	97	100.000.000	Penataan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	<i>Persentase dokumen kependudukan yang terpenuhi</i>	97	120.000.000	

Rancangan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
B2.1	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000	100.000.000	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	10000	120.000.000	
B.3	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	<b>Persentase pelayanan terhadap pendaftaran penduduk</b>	<b>97</b>	<b>15.000.000</b>	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	<b>Persentase pelayanan terhadap pendaftaran penduduk</b>	<b>97</b>	<b>18.000.000</b>	
B3.1	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2	15.000.000	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	2	18.000.000	
B.4	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.</b>	Kab. Paser	<b>Persentase laporan data kependudukan</b>	<b>97</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.</b>	Kab. Paser	<b>Persentase laporan data kependudukan</b>	<b>97</b>	<b>60.000.000</b>	
B4.1	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	50,000,000	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1	60,000,000	

Rancangan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Paser	<i>Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)</i>	97	163.000.000	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Paser	<i>Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)</i>	97	195.600.000	
C.1	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Paser	<b>Persentase data pencatatan sipil yang terdaftar</b>	<b>97</b>	<b>150.000.000</b>	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Paser	<b>Persentase data pencatatan sipil yang terdaftar</b>	<b>97</b>	<b>180.000.000</b>	
C1.1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000	150.000.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	6000	180.000.000	
C.2	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Kab. Paser	<i>Persentase pelayanan terhadap pencatatan sipil</i>	97	33.000.000	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Kab. Paser	<i>Persentase pelayanan terhadap pencatatan sipil</i>	97	33.000.000	
C1.1	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kab.Pase	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	50	15,000,000	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Kab.Pase	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	50	39.600.000	
C1.2	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Kab.Pase	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	18,000,000	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Kab.Pase	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	5	21.600.000	

Rancangan RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indikator Kinerja	Target Capaia n	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lok asi	Indik er Kinerja	Target Capaia n	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Paser	Persentase data kependudukan yang valid	97	1.786.214.740	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Kab. Paser	Persentase data kependudukan yang valid	97	2.143.457.68 8	
D.1	Pengumpulan Data Kependudukandan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Paser	Persentase pengelolaan data kependudukan	97	1.627.984.220	Pengumpulan Data Kependudukandan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kab. Paser	Persentase pengelolaan data kependudukan	97	1.953.581.06 4	
D1.1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	1.627.984.22 0	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab.Paser	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12	1.953.581.06 4	



## **E. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Paser.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser secara langsung berhubungan dalam hal pelayanan terhadap masyarakat, meskipun demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Paser mengupayakan untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam undang undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolosi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang mentukan bahwa setiap kegiatan dan akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada msyarkat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### A. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) pada hakekatnya bahwa upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan, tidak sekedar pengawasan terhadap pengadaan blanko-blanko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis. Artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa vital (vital even) yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki insentif/benefit bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas Negara atau pemerintah sebagai pelayanan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, factor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :

- a. Aspek Landasan Hukum
- b. Aspek Kelembagaan dan SDM
- c. Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem Pelayanan
- d. Aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat
- e. Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau Pembangunan Bank Data Kependudukan

2. Penerapan KTP berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) telah sesuai dengan pasal 6 perpres No.26 Tahun 2009 tentang penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional dan Perpres No.35 Tahun 2010 tentang perubahan atas Perpres No. 26 tahun 2009 yang berbunyi :
  - a. KTP berbasis NIK memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai alat verifikasi dan validasi data jati diri penduduk;
  - b. Rekaman elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biodata, tanda tangan, pas foto, dan sidik jari tangan penduduk yang bersangkutan; dan rekaman retina mata;
  - c. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk disimpan dalam database kependudukan;
  - d. Pengambilan seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada saat pengajuan permohonan KTP berbasis NIK, dengan ketentuan : untuk WNI, dilakukan di kecamatan; dan untuk orang asing yang memiliki izin tinggal tetap dilakukan di instansi pelaksana;
  - e. Rekaman sidik jari tangan penduduk yang dimuat dalam KTP berbasis NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk yang bersangkutan;
  - f. Rekaman seluruh sidik jari tangan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- g. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perekaman sidik jari diaturoleh peraturan menteri.

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Paser		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan kependudukan	80	81	82	83	84
	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Rata-rata waktu penyelesaian dokumen kependudukan (KK, KIA dan KTP)	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam	2 jam
		Rata-rata waktu penyelesaian dokumen catatan sipil (akte kelahiran, kematian, pengangkatan anak, perkawinan/perceraian)	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam	1 jam
	Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan	Persentase Lembaga Yang Memanfaatkan Data Kependudukan	10	15	20	25	30
Meningkatnya tata kelola perangkat daerah yang responsif dan Tangkas		Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	60 (CC)	65 (CC)	70 (B)	75 (B)	80 (A)
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Jumlah temuan pengelolaan keuangan dan BMD yang material dari APIP dan BPK	0	0	0	0	0
		Penilaian SAKIP	61 (B)	65 (B)	70 (BB)	75 (BB)	81 (A)

**Keselarasn Kebijakan Nasional dengan Kebijakan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Paser**

Kebijakan Nasional	Kebijakan Pemerintah Daerah
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Kualitas Pelayanan penerbitan KTP-el, dan Akta Pencatatan Sipil, KIA serta pelayanan pemanfaatan KIA, NIK, KTP Elektronik dan Data Kependudukan Kepada Lembaga Pengguna, Penerapan Buku Pokok Pemakaman, Penerapan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten/Kota</li> <li>• Capaian Keluaran/Output Kinerja Pelayanan Dokumen Lainnya</li> <li>• Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan</li> <li>• Laporan Barang Milik Negara (BMN) Dukcapil di Daerah</li> <li>• Penyajian Data Kependudukan berskala Kabupaten/Kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian</li> <li>• Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk membantu penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan</li> <li>• Penerapan Zona Integritas (ZI)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil</li> <li>• Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan</li> <li>• Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah</li> </ul>

**3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

➤ **Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2022 – 2026

adalah :

***Ranhir Renja Disdukcapil Kab. Paser Tahun 2024***

“Meningkatkan penataan dan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Paser”  
” Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang daerah yang responsif dan tangkas”

### ➤ Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tertentu triwulan atau bulanan, sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan strategik yang berfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas, sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur dan dicapai, berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun.

Berdasarkan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser maka sasaran di rumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
2. Meningkatnya Instansi Pengguna Data Kependudukan
3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

### 3.3. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Adapun faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan yang berpedoman pada kaidah-kaidah yang sudah ada yaitu RPJP dan RPJM Nasional dan RPJP dan RPJM Provinsi serta Visi Misi Kabupaten Paser.

Visi yaitu Terwujudnya Kabupaten Paser yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan berkeadilan. Serta Misi ke empat yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :  
***Ranhir Renja Disdukcapil Kab. Paser Tahun 2024***

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk;
3. Program Pencatatan Sipil;
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
5. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

### **3.4 Kegiatan**

Program / kegiatan SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
5. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6. Penataan Pendaftaran Penduduk
7. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
8. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.
9. Pelayanan Pencatatan Sipil
10. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
11. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
12. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
13. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
14. Penyusunan Profil Kependudukan

### **3.5 Sub Kegiatan**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
9. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
14. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
15. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
16. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
17. Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
18. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan
19. Sosialisasi Pendaftaran Penduduk
20. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
21. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
22. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
23. Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil
24. Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program.

Berikut lampiran gambaran rancangan awal renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser

Table 3.1

## RENCANA PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN RENCANA TAHUN 2025

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				Cat.	PRAKIRAAN RENCANA TA 2025	
							LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	Sumber Dana		TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6	7	8	9	
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan pelayanan sekretariat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik	Kab. Paser	74 % 85 %	6.957.047.615,00	APBD	80% 90%	7.693.849.634,00	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketepatan tahapan penyusunan dokumen perencanaan PD	Kab. Paser	100	125.000.000		100	326.000.000,00	
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	1	35.000.000	APBD	1	121.000.000	
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	Kab. Paser	1	30.000.000	APBD	1	1.650.000.000	
2	12	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	1	60.000.000	APBD	1	180.000.000	
2	12	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	2	30.000.000	APBD	2	25.000.000	

2	12	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase temuan ditidaklanjuti</b>	Kab. Paser	100	6.577.970.754,00	APBD	100	6.631.849.634,00
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	33	6.340.222.050	APBD	33	6.331.849.634
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Kab. Paser	10	237.748.704	APBD	10	300,000,000
2	12	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</i>	Kab. Paser	100	214.076.861	APBD	100	595.000.000
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin	Kab. Paser	15	20.000.000	APBD	15	17,500,000
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Paser	10	5.000.000	APBD	10	17.500.000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Perlengkapan Kebersihan	Kab. Paser	50	24.576.861,00	APBD	50	135,000,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Kab. Paser	25	7.000.000	APBD	25	25,000,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas dan Rapat Koordinasi	Kab. Paser	20	157.500.000	APBD	20	400,000,000

2	12	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase barang inventaris dalam kondisi baik</b>	Kab. Paser	47	40.000.000	APBD	47	141.000.000
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	Kab. Paser	4	25.000,000	APBD	4	93,000,000
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	Kab. Paser	100	15.000.000	APBD	100	48.000.000
2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)</b>	Kab. Paser	97	245.000.000,00	APBD	98	1.201.635.400,
2	12	02	2.01		<b>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase data kependudukan yang terpenuhi</b>	Kab. Paser	97	80.000.000	APBD	98	846.035.400
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Kab. Paser	100	15,000,000	APBD	100	35,208,000
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	8000	50,000,000	APBD	8000	275,000,000
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	2	15.000,000	APBD	2	535.827.400

2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang terpenuhi	Kab. Paser	97	100.000.000	APBD	98	180.000.000
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Paser	10000	100.000.000	APBD	10000	180.000.000
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan terhadap pendaftaran penduduk	Kab. Paser	97	15.000.000	APBD	98	61.600.000
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	2	15.000.000	APBD	2	61.600.000
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.	Persentase laporan data kependudukan	Kab. Paser	97	50.000.000	APBD	98	114.000.000
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	1	50,000,000	APBD	1	144,000,000
2	12				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<i>Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)</i>	Kab. Paser	97	163.000.000	APBD	98	692.055.216
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase data pencatatan sipil yang terdaftar	Kab. Paser	97	150.000.000	APBD	98	644.555.216
2	12	03	2.02	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	6000	150.000.000	APBD	6000	644.555.216
2	12	03	201		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Persentase pelayanan terhadap pencatatan sipil</i>	Kab. Paser	97	33.000.000	APBD	98	47.500.000

2	12	03	202	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Kab. Paser	50	15,000,000	APBD	50	27.500.000
2	12	03	202	08	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Paser	5	18,000,000	APBD	5	20,000,000
2	12	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase data kependudukan yang valid</b>	Kab. Paser	<b>97</b>	<b>1.786.214.740</b>	<b>APBD</b>	<b>98</b>	<b>1.787.431.984</b>
2	12	04	2.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase pengelolaan data kependudukan</b>	Kab. Paser	<b>97</b>	<b>1.627.984.220</b>	<b>APBD</b>	<b>98</b>	<b>1.600.000.000</b>
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Paser	12	1.627.984.220	APBD	12	1,600,000,000

2	12	04	203		<b>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>					APBD		
2	12	04	203	03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	2	26,400,000	APBD		35,235,360
2	12	04	203	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser	10	51,830,520	APBD		62,196,624
2	12	04	203	06	Kerja sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser	10	20,000,000	APBD		21,600,000
2	12	04	204		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>					APBD		
2	12	04	204	03	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data	Kab. Paser	2	60,000,000	APBD		72,000,000
2	12	05			<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>					APBD		
2	12	05	2.01		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>					APBD		
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Kab. Paser	97	28,800,000	APBD	4	34,560,000

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Di dalam rencana kerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Di dalam rencana kerja juga tertuang Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan rencana kerja yang terdiri dari program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian kinerja menyajikan indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil- hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan pada tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dengan demikian dapat diuraikan bahwa Rencana Kerja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022 meliputi 2 (Dua) sasaran strategis dengan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama serta ada target sesuai dengan yang tersaji pada tabel 1. berikut ini:

Table 4.1

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

KODE REKENING					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024		
							LOKASI	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1					2	3	4	5	6
2	12	01			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Indeks kepuasan pelayanan sekretariat persentase perangkat daerah dengan nilai IRB baik</b>	<b>Kab. Paser</b>	<b>74 % 85 %</b>	<b>6.957.047.615,00</b>
2	12	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase ketepatan tahap penyusunan dokumen perencanaan PD</b>	<b>Kab. Paser</b>	<b>100</b>	<b>125.000.000</b>
2	12	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Paser	1	35.000.000
2	12	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja	Kab. Paser	1	30.000.000
2	12	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Paser	1	60.000.000
2	12	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Paser	2	30.000.000

2	12	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase temuan ditidaklanjuti</b>	Kab. Paser	100	6.577.970.754,00
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Paser	33	6.340.222..050
2	12	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	Kab. Paser	10	237.748.704
2	12	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<i>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran</i>	Kab. Paser	100	214.076.861
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan mesin	Kab. Paser	15	20.000.000
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Paser	10	5.000.000
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Perlengkapan Kebersihan	Kab. Paser	50	24.576.861,00
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak	Kab. Paser	25	7.000.000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumla Perjalanan Dinas dan Rapat Kordinasi	Kab. Paser	20	157.500.000

2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang inventaris dalam kondisi baik</i>	Kab. Paser	47	40.000.000
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Mobil Operasional Yang Dipelihara	Kab. Paser	4	25.000,000
2	12	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan Komputer Yang Dipelihara	Kab. Paser	100	15.000.000
2	12	02			<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Rasio kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK)</b>	Kab. Paser	97	245.000.000,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	<i>Persentase data kependudukan yang terpenuhi</i>	Kab. Paser	97	80.000.000
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Kab. Paser	100	15.000,000
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	8000	50,000,000
2	12	02	2.01	07	Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Paser	2	15.000,000

2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase dokumen kependudukan yang terpenuhi	Kab. Paser	97	100.000.000
2	12	02	2.02	02	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Kab. Paser	10000	100.000.000
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase pelayanan terhadap pendaftaran penduduk	Kab. Paser	97	15.000.000
2	12	02	2.03	05	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	2	15.000.000
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk.	Persentase laporan data kependudukan	Kab. Paser	97	50.000.000
2	12	02	2.04	03	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Paser	1	50,000,000
2	12				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	<i>Rasio kepemilikan dokumen pencatatan sipil (Akte kelahiran, kematian, nikah, cerai)</i>	Kab. Paser	97	163.000.000
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase data pencatatan sipil yang terdaftar	Kab. Paser	97	150.000.000
2	12	03	2.02	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Paser	6000	150.000.000
2	12	03	201		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	<i>Persentase pelayanan terhadap pencatatan sipil</i>	Kab. Paser	97	33.000.000

2	12	03	202	06	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Kab. Paser	50	15,000,000
2	12	03	202	08	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Paser	5	18,000,000
2	12	04			<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase data kependudukan yang valid</b>	Kab. Paser	<b>97</b>	<b>1.786.214.740</b>
2	12	04	2.01		<b>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase pengelolaan data Kependudukan</b>	Kab. Paser	<b>97</b>	<b>1.627.984.220</b>
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Paser	12	1.627.984.220
2	12	04	2.01	01	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen dan laporan fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Paser	2	26.400.000
2	12	04	2.01	01	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Paser		51.830.520
2	12	04	2.01	01	Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Masyarakat dan Perguruan Tinggi	Kab. Paser		20.000.000
2	12	04	2.04		<b>Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase dokumen/laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Kab. Paser	<b>97</b>	<b>60.000.000</b>
2	12	04	2.01	03	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Paser		60.000.000
2	12	05	2		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Persentase pemanfaatan data kependudukan	Kab. Paser	<b>100</b>	<b>28.800.000</b>
2	12	05	2.01		<b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Persentase laporan profil kependudukan	Kab. Paser	<b>100</b>	<b>28.800.000</b>
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kab. Paser	4	28.800.000

## BAB V PENUTUP

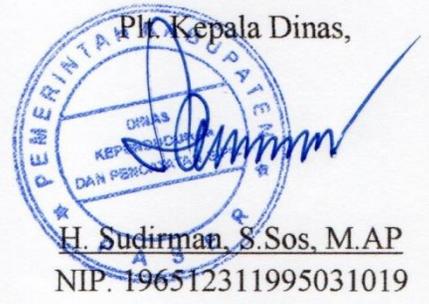
Sebagaimana amanat dan ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman pada Rencana Strategis OPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah memuat misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program prioritas.

Semoga Rencana Kerja ini dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RK-A) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser Tahun 2024.

Tana Paser, 28 Agustus 2023

Plt. Kepala Dinas,



H. Sudirman, S.Sos, M.AP  
NIP. 196512311995031019



